

ABSTRAK

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

PATRI RESNA

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD difasilitasi oleh sekretariat DPRD, khususnya bagian perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Menganalisis upaya optimalisasi sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk meningkatkan kapasitas bagian perundang-undangan dalam memfasilitasi pembentukan perda, 2) menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi bagian perundang-undangan dalam memfasilitasi pembentukan perda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu perancang peraturan perundang-undangan, analis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analis publikasi, pengelola data sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dan akademisi. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan kapasitas oleh Grindle, dengan indikator pengembangan SDM yang terdiri dari aspek rekrutmen, pelatihan, dan kondisi kerja, dan indikator penguatan organisasi yang terdiri dari aspek pemanfaatan personil dan kepemimpinan. Mekanisme rekrutmen belum mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja, sehingga jumlah perancang peraturan perundang-undangan masih terbatas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh sekretariat maupun dari pihak eksternal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi pegawai. Kondisi kerja baik secara fisik maupun non-fisik telah mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemanfaatan personil belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diemban. Pelaksanaan kepemimpinan pada bagian perundang-undangan berjalan dengan baik. Dalam tahapan pembentukan perda, bagian perundang-undangan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, namun pada tahap penyebarluasan, ditemukan keterlambatan publikasi. Secara keseluruhan upaya optimalisasi belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat hambatan struktural dan teknis.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi DPRD, Bagian Perundang-undangan, Pembangunan Kapasitas SDM dan Organisasi

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE LEGISLATION SECTION IN THE PROCESS OF FORMING REGIONAL REGULATIONS (STUDI AT THE SECRETARIAT OF THE LAMPUNG PROVINCE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL)

By

PATRI RESNA

The implementation of the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD) is facilitated by the DPRD secretariat, particularly the legislation division. This research aims to: 1) Analyze the optimization efforts of the Lampung Provincial DPRD secretariat to enhance the capacity of the legislation division in facilitating the formation of regional regulations (perda), and 2) Analyze how the tasks and functions of the legislation division are carried out in facilitating the formation of regional regulations. This study is a descriptive qualitative research. Data were collected through interviews and documentation. The research informants include legislative regulation designers, legislative draft analysts, publication analysts, data managers of the Lampung Provincial DPRD secretariat, and academics. This research employs Grindle's capacity development theory, with indicators of human resource development consisting of recruitment, training, and working conditions, and organizational strengthening indicators consisting of personnel utilization and leadership aspects. The recruitment mechanism has not accommodated the workforce needs, resulting in a limited number of legislative regulation designers. Training conducted by both the secretariat and external parties contributes to the improvement of employee competencies. Working conditions, both physical and non-physical, have supported the execution of tasks and functions. Personnel utilization has not been effectively implemented due to a mismatch between educational backgrounds and the positions held. Leadership in the legislation division is functioning well. In the stages of forming regional regulations, the legislation division performs its tasks and functions effectively; however, delays in publication were found during the dissemination stage. Overall, optimization efforts have not been fully realized due to existing structural and technical obstacles.

Keywords: Legislative Function of DPRD, Legislation Division, Human Resources and Organizational Capacity Building